

ABSTRAK

IMPLEMENTASI FUNGSI REPRESENTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Komparatif DPRD Kota Bandar Lampung dan DPRD Kabupaten Lampung Utara)

Oleh

HANDRIE KURNIAWAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi fungsi representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui studi komparatif di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Utara. Berangkat dari kerangka demokrasi perwakilan deliberatif Nadia Urbinati, penelitian ini menelaah bagaimana aspirasi dan opini publik disalurkan serta dikonversi menjadi kebijakan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Analisis difokuskan pada empat dimensi representasi: partisipasi publik, keterbukaan, akuntabilitas dan responsivitas, serta kualitas kebijakan.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, dengan analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi representasi DPRD di kedua daerah berjalan prosedural, namun lemah secara substantif. Kanal opini dan kehendak masyarakat tidak menghasilkan konversi ke dalam kebijakan dan gagal menjadi dasar representasi yang deliberatif. Keterbatasan kelembagaan, fragmentasi politik, kapasitas sumber daya legislatif yang belum memadai, dominasi eksekutif, dan keterbatasan fiskal menjadi faktor utama penyebab lemahnya representasi substantif. Bandar Lampung menunjukkan kondisi lebih baik dibanding Lampung Utara, namun masih menghadapi masalah serupa.

Secara teoretis, penelitian ini menyempurnakan konsep Urbinati dengan mengajukan tiga prasyarat operasional kelembagaan, politik, dan regulasi serta pra-kondisi pendukungnya sebagai fondasi representasi deliberatif di tingkat lokal. Secara praktis, penelitian menawarkan model penguatan tata kelola DPRD dan reformasi mekanisme elektoral serta penguatan keterbukaan dan akuntabilitas publik untuk mencegah krisis legitimasi dan memulihkan hubungan wakil dan rakyat untuk memperkuat pembangunan daerah dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kata kunci: Representasi, DPRD, Demokrasi Deliberatif, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE REPRESENTATIVE FUNCTION REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL IN ADMINISTRATION REGIONAL GOVERNMENT

**(A Comparative Study of the DPRD of Bandar Lampung City and
North Lampung Regency)**

By

HANDRIE KURNIAWAN

This study examines the implementation of the representative function of the Regional People's Representative Council (DPRD) within the framework of local governance through a comparative study of Bandar Lampung City and North Lampung Regency. Using Nadia Urbinati's concept of deliberative representative democracy, the research analyzes how legislators articulate the will and opinion of citizens within local democratic governance. The analysis employs four key dimensions: citizen participation, public transparency, responsiveness and accountability, and policy impact.

Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings reveal that the representative function of DPRD tends to operate procedurally rather than substantively. The channels for public opinion and community will fail to translate into policy and do not serve as a foundation for deliberative representation. Fiscal disparities between Bandar Lampung and North Lampung affect the degree of representation, while both regions share fundamental constraints, including weak internal consolidation, dominance of local executives, and limited human resource capacity.

Theoretically, this study refines Urbinati's model by incorporating institutional, political, and regulatory dimensions as essential prerequisites for implementing deliberative representation in local governance. Practically, it identifies five key determinants of effective representation: electoral system design, institutional capacity, internal party consolidation, human resource quality, and fiscal capacity. The research emphasizes the urgent need for institutional reform, political capacity enhancement, and the strengthened of public accountability to reinforce DPRD's role in Indonesia's decentralized democracy.

Keywords : Representative , DPRD, Deliberative Democracy, Local Governance